

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang mengalami permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari berdirinya badan usaha yang ada di Indonesia. Kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sekarang ini belum mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada dalam masyarakat luas. Situasi permasalahan itulah yang mendasari masyarakat untuk hidup dalam berorganisasi. Banyak bentuk organisasi dalam kalangan masyarakat salah satunya bergerak dalam bidang sosial yang dikenal dengan istilah organisasi nirlaba.

Menurut Nuzuli (2007) panti asuhan merupakan lembaga atau yayasan yang penyaluran bakat dan minat sekaligus sebagai sarana peningkat pendidikan bagi anak-anak dan tempat untuk merawat, memelihara, membina dan mengasuh anak yatim, yatim piatu dan juga anak-anak terlantar karena keadaan tertentu. Sedangkan menurut UU No. 16 Tahun 2011, sebagai dasar hukum positif yayasan, pengertian yayasan adalah badan hukum yayasan yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha (Hendrawan, 2011).

Menurut Salusu (2003) yang menyatakan bahwa “organisasi *non profit* adalah organisasi atau badan yang tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya dalam melayani masyarakat atau disebut juga sebagai korporasi yang tidak membagikan keuntungan sedikitpun kepada para anggota, karyawan serta eksekutifnya. Pada beberapa bentuk entitas nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, entitas nirlaba tersebut mendanai modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah dan kepastian arus kas masuk menjadi ukuran kinerja penting bagi pengguna laporan keuangan, seperti kreditur dan pemasok dana lain. Kemampuan entitas nirlaba untuk terus memberikan jasa di komunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, aset neto, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Entitas nirlaba misalnya layanan sosial, kesehatan, pendidikan dan keagamaan. Layanan sosial seperti panti asuhan termasuk organisasi nirlaba yang memperoleh modal sendiri atau *fund capital* dengan cara menerima sumbangan atau bantuan dan donasi dari individu atau kelompok masyarakat.

Menurut PSAK No. 45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. (IAI, 2004: 45.1)

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain

yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis misalnya penerimaan sumbangan. (Hendrawan, 2011)

Penyusunan laporan keuangan harus jelas untuk pelaporan bagi pihak yang memberikan sumbangan. Laporan keuangan secara umum bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan dan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas. Laporan keuangan pada organisasi nirlaba terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. (IAI, 2012)

Salah satu bentuk organisasi nirlaba ditengah masyarakat adalah panti asuhan. Panti sosial asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) menurut Depsos RI (2004: 4), yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orangtua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Menurut Gospor Nabor (Bardawi Barzan: 1999: 5): “Panti asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang bertujuan untuk membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup”.

Panti asuhan Al-Ikhsan merupakan salah satu bentuk yayasan, yang bergerak dibidang pendidikan berbasis islam beralamat di Jl. Pahlawan No. 127 Kec. Wuluhan Kab. Jember. Panti Asuhan Al-Ikhsan ini semula sebagai sarana peningkatan pendidikan bagi anak-anak yatim piatu yang terbentuk karena di ilhami oleh banyaknya anak-anak dibawah umur yang terlantar di karenakan telah ditinggalkan orangtua dan dari orangtua yang tidak mampu. Islam dengan syari'atnya, memerintahkan kaumnya agar memperlakukan anak yatim dengan baik, menjamin kebutuhannya, membimbing dan mengarahkan sehingga anak tersebut terbina dan terdidik dengan baik, tumbuh dengan akhlak yang mulia dan jiwa yang luhur, mendapat kelembutan, kasih sayang dan keikhlasan. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri salah satunya harus ditopang dengan materi dalam hal ini dana yang mencakup kebutuhan sehari-hari, yakni membutuhkan suplai dana untuk bisa menjalankan dan mengembangkan panti ke arah yang lebih baik.

Sebagai salah satu organisasi nirlaba, Panti asuhan Al-Ikhsan harus menerapkan PSAK No. 45 dalam melakukan penyusunan laporan keuangannya. Pihak panti asuhan menyadari bahwa belum bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan

standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pencatatan hanya dilakukan secara sederhana dan membutuhkan perbaikan.

Selama berdirinya panti asuhan telah menerapkan pelaporan keuangan dengan sederhana, namun saat ini dengan berkembangnya panti asuhan dan sistem keuangan tidak bisa hanya dilakukan sistem pelaporan yang sederhana namun harus memiliki sistem pelaporan yang lebih baik. Agar kekurangan-kekurangan yang melekat pada semua sektor dan perangkat dari kehidupan di panti asuhan dapat segera dibenahi. Oleh karenanya pengelola organisasi nirlaba harus mampu memberikan laporan keuangan yang baik kepada para penyumbang. Pihak manajemen organisasi harus dapat memikirkan bagaimana cara menyajikan laporan keuangan organisasi nirlaba kepada pihak internal dan terutama kepada pihak eksternal agar para penyumbang tidak kehilangan kepercayaan dan menghentikan sumber dana terhadap organisasi nirlaba yang dikelolanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panti asuhan Al Ikhwan wulhan belum menerapkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada penyajian laporan keuangannya dari segi format laporan keuangan maupun penyusunan laporan keuangan.

NO	KETERANGAN	Debit	Kredit	Saldo
1	Sal. Awal			
2	Sal. Akhir			
3	Sal. Awal			
4	Sal. Akhir			
5	Sal. Awal			
6	Sal. Akhir			
7	Sal. Awal			
8	Sal. Akhir			
9	Sal. Awal			
10	Sal. Akhir			
11	Sal. Awal			
12	Sal. Akhir			
13	Sal. Awal			
14	Sal. Akhir			
15	Sal. Awal			
16	Sal. Akhir			
17	Sal. Awal			
18	Sal. Akhir			
19	Sal. Awal			
20	Sal. Akhir			
21	Sal. Awal			
22	Sal. Akhir			
23	Sal. Awal			
24	Sal. Akhir			
25	Sal. Awal			
26	Sal. Akhir			
27	Sal. Awal			
28	Sal. Akhir			
29	Sal. Awal			
30	Sal. Akhir			
31	Sal. Awal			
32	Sal. Akhir			
33	Sal. Awal			
34	Sal. Akhir			
35	Sal. Awal			
36	Sal. Akhir			
37	Sal. Awal			
38	Sal. Akhir			
39	Sal. Awal			
40	Sal. Akhir			
41	Sal. Awal			
42	Sal. Akhir			
43	Sal. Awal			
44	Sal. Akhir			
45	Sal. Awal			
46	Sal. Akhir			
47	Sal. Awal			
48	Sal. Akhir			
49	Sal. Awal			
50	Sal. Akhir			
51	Sal. Awal			
52	Sal. Akhir			
53	Sal. Awal			
54	Sal. Akhir			
55	Sal. Awal			
56	Sal. Akhir			
57	Sal. Awal			
58	Sal. Akhir			
59	Sal. Awal			
60	Sal. Akhir			
61	Sal. Awal			
62	Sal. Akhir			
63	Sal. Awal			
64	Sal. Akhir			
65	Sal. Awal			
66	Sal. Akhir			
67	Sal. Awal			
68	Sal. Akhir			
69	Sal. Awal			
70	Sal. Akhir			
71	Sal. Awal			
72	Sal. Akhir			
73	Sal. Awal			
74	Sal. Akhir			
75	Sal. Awal			
76	Sal. Akhir			
77	Sal. Awal			
78	Sal. Akhir			
79	Sal. Awal			
80	Sal. Akhir			
81	Sal. Awal			
82	Sal. Akhir			
83	Sal. Awal			
84	Sal. Akhir			
85	Sal. Awal			
86	Sal. Akhir			
87	Sal. Awal			
88	Sal. Akhir			
89	Sal. Awal			
90	Sal. Akhir			
91	Sal. Awal			
92	Sal. Akhir			
93	Sal. Awal			
94	Sal. Akhir			
95	Sal. Awal			
96	Sal. Akhir			
97	Sal. Awal			
98	Sal. Akhir			
99	Sal. Awal			
100	Sal. Akhir			

Tujuan penyajian laporan keuangan adalah memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemegang organisasi dan evaluasi kinerja pimpinan organisasi. (Sujarweni 2015: 5). Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba.

Sebagai entitas nirlaba maka sudah seharusnya pelaporan keuangan panti asuhan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, dalam hal ini adalah Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 (revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Pernyataan tersebut dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi.

Fungsi akuntansi menjadi semakin penting, karena tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang dihasilkan akuntansi berbentuk laporan keuangan, dimana laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja pegawai serta perubahan posisi keuangan suatu organisasi bisnis yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Berdasarkan fenomena diatas mengingat pentingnya Penyusunan Laporan Keuangan bagi Yayasan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ” **ANALISIS PENERAPAN PSAK 45 PADA YAYASAN PANTI ASUHAN AL-IKHSAN KECAMATAN WULUHAN.**”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus yayasan panti asuhan Al-Ikhsan?
2. Apakah pelaporan keuangan sudah sesuai PSAK 45 pada yayasan panti asuhan Al-Ikhsan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus yayasan panti asuhan Al-Ikhsan .
2. Untuk menganalisis apakah pelaporan keuangan sudah sesuai PSAK 45 pada yayasan panti asuhan Al-Ikhsan.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis:
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, terutama dalam hal analisis laporan keuangan untuk mengelola keuangan pada yayasan panti asuhan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan sesuatu dalam perkembangan dan perluasan akuntansi diluar dengan metode yang alternatif lainnya.

b. Bagi Penulis

Memberikan gambaran akan bentuk pengelolaan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan yayasan panti asuhan sebagai entitas public, dan

c. Sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah berikutnya.

